

LAPORAN KINERJA 2021

INSPEKTORAT WILAYAH I

Katalog : 1202059

ST 2023
SENSUS PERTANIAN



BADAN PUSAT STATISTIK





LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT WILAYAH I TAHUN ANGGARAN 2021



BADAN PUSAT STATISTIK

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah I Badan Pusat Statistik Tahun 2021. Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja Inspektorat Wilayah I kepada publik dan pemangku kepentingan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja.



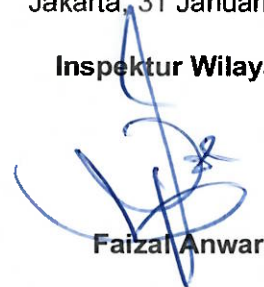
Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah I berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai unit pengawasan intern di Lingkungan BPS, kinerja Inspektorat Wilayah I harus dapat berkontribusi dan berkolaborasi dengan unit kerja lain dalam mendukung pencapaian visi dan misi BPS yang dijabarkan dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024. Kontribusi yang dapat diberikan dari hasil pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Wilayah I diantaranya meningkatkan kualitas laporan keuangan, meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan meningkatkan penilaian Reformasi Birokrasi (RB).

Kami berharap Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah I dapat memberikan gambaran mengenai kinerja Inspektorat Wilayah I selama tahun 2021 secara terperinci dan transparan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah I. Selain itu, semoga laporan kinerja ini dapat berguna untuk evaluasi dan demi peningkatan kinerja Inspektorat Wilayah I pada khususnya.

Jakarta, 31 Januari 2021

Inspektur Wilayah I



Faizal Anwar

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Lampiran	v
Ikhtisar Eksekutif	vi
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
1.4 Tanggung Jawab dan Wewenang	2
1.5 Sumber Daya Manusia Inspektorat Wilayah I	3
1.6 Potensi dan Permasalahan	5
1.7 Sistematika Penyajian Laporan	6
Bab II Perencanaan Kinerja	7
2.1 Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama 2020-2024	7
2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Wilayah I 2021	9
Bab III Akuntabilitas Kinerja	11
3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah I 2021	11
3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020	24
3.3 Capaian Kinerja terhadap Target Renstra 2020-2024	31
3.4 Prestasi tahun 2021	33
3.5 Realisasi Anggaran Tahun 2021	33
3.6 Upaya Efisiensi Inspektorat Utama 2021	34
Bab IV Penutup	36
4.1 Tinjauan Umum	36
4.2 Tindak Lanjut	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama 2020-2024.....	8
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2021.....	9
Tabel 3	Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2021.....	11
Tabel 4	Nilai Pilar Penguatan Pengawasan RB Instansi Tahun 2021	20
Tabel 5	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Wilayah I Tahun 2020-2021	23
Tabel 6	Capaian Kinerja 2021 terhadap Target Renstra 2024	31
Tabel 7	Pagu dan Realisasi Anggaran 2021 per Indikator Kinerja.....	33
Tabel 8	Perbandingan Efisiensi Menurut Tujuan dan Sasaran Tahun 2021.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat Wilayah I.....	4
Gambar 2	Jabatan Fungsional Pegawai Inspektorat Wilayah I.....	4
Gambar 3	Visi dan Misi Inspektorat Utama 2020-2024	8
Gambar 4	Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama	9

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPS.....	38
Lampiran 2	Target Kinerja pada Renstra Inspektorat Wilayah I Tahun 2020-2024	39
Lampiran 3	Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	40
Lampiran 4	Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2020 per Triwulan	41
Lampiran 5	Daftar Satuan Kerja Inspektorat Wilayah I Yang Diaudit tahun 2021.....	43
Lampiran 6	Daftar Nama Satker yang Mendapatkan Predikat WBK dan WBBM (Berdasar SK Kepala BPS RI) Tahun 2021	44
Lampiran 7	Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2020 Satker BPS Prov/Kab/Kota di bawah Pembinaan Inspektorat Wilayah 1.....	45
Lampiran 8	Daftar Satker Yang Menjadi Sampel Reviu Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020	48
Lampiran 9	Data Auditor Yang Memenuhi Standar Sertifikasi Dilkat Sesuai Jenjang	50

IKHTISAR EKSEKUTIF

Inspektorat Wilayah I sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Badan Pusat Statistik mempunyai peran yang signifikan untuk menghidupkan semangat dan menjaga agar reformasi birokrasi berjalan secara berkesinambungan dalam mewujudkan kepercayaan publik dalam menghasilkan data yang terpercaya dan berkualitas. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektorat Wilayah I telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024.

Visi Inspektorat Wilayah I 2020-2024 adalah **“Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, Inspektorat Wilayah I mempunyai tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis yaitu meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis. Sasaran strategis pertama, meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS. Sasaran strategis kedua, mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Inspektorat Wilayah I memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang sama dengan Inspektorat Utama. Sedangkan indikator kinerja utama (IKU) Inspektorat Wilayah I merupakan turunan dari IKU Inspektorat Utama BPS.

Inspektorat Wilayah I memiliki satu komponen dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yaitu pengawasan dan peningkatan akuntabilitas Inspektorat I. Adapun anggaran pada tahun 2021 di Inspektorat Wilayah I sebesar Rp1.119.547.000,- dengan realisasi sebesar Rp1.051.787.677,- (93,95 %).

Pencapaian atas sasaran strategis, IKU dan IKS tahun 2020 menunjukkan hasil yang baik. Dari 2 (dua) sasaran strategis dan 9 (sembilan) IKU yang menjadi Penetapan Kinerja Inspektur Wilayah I tahun 2021, sebanyak 8 (delapan) IKU terealisasi sesuai atau diatas target. Sementara itu terdapat 1 (satu) IKU yang tidak tercapai pencapaiannya yaitu “Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi Diklat pengawasan sesuai jenjangnya”. Capain ini meningkat dibanding tahun 2020 yang lalu dimana masih terdapat 2 (dua) IKU yang tidak tercapai targetnya. Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat Wilayah I di tahun 2021 telah lebih baik dalam pencapaian target kinerja. Secara rinci realisasi masing-masing IKU dapat dilihat pada tabel berikut :

Capaian IKU Inspektorat Wilayah I Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tar get	Reali sasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari satker yang diperiksa)	96	100	104,17
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	75	80,31	107,08
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I	94	97,16	103,36
	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	75	79,75	106,34
	Persentase satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	96	100	104,17
Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah I	95	100	105,26
	Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBK (dari jumlah keseluruhan)	13	34,97	120,00
	Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBBM (dari jumlah keseluruhan)	5	6,13	120,00
	Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya	60	54,17	90,28
Rata-Rata Capaian Kinerja				106,74

Capaian kinerja Inspektorat Wilayah I pada tahun 2021 memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 106,74 persen. Tujuan/sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Wilayah I tahun 2021 dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah I. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengetahui kinerja Inspektorat Wilayah I pada tahun 2021 dan selanjutnya dapat digunakan dalam membuat rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah I di masa mendatang.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik nomor 7 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik, tugas Inspektorat Wilayah I adalah melaksanakan pengawasan fungsional, yaitu pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Inspektorat Wilayah I memiliki tugas melakukan pengawasan fungsional yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2021 serta diselaraskan dengan Renstra 2020-2024.

Pada awal tahun 2021, Inspektorat Wilayah I menetapkan target kinerja dari setiap indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Wilayah I tahun 2021. Realisasi dari target yang telah ditetapkan pada awal tahun tersebut, akan dimonitoring setiap triwulanan dalam bentuk matrik rencana aksi dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja interim (laporan capaian kinerja triwulanan) dan laporan kinerja tahunan.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 pasal 18, disebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan maupun sasaran, akan dituangkan dalam laporan kinerja tahunan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mewajibkan setiap Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan dipandang perlu untuk menyampaikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja tahun 2021 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Wilayah I kepada Inspektur Utama dan Kepala BPS atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai

sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran selama tahun 2021.

1.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Kedudukan Inspektorat Wilayah I dalam struktur organisasi Badan Pusat Statistik sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik, adalah sebagai unsur pengawas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektorat Utama dan Kepala BPS. Inspektorat Wilayah I dipimpin oleh seorang Inspektur dengan jabatan Eselon II.

Tugas Inspektorat Wilayah I seperti tercantum pada BAB X Bagian ketiga Pasal 101 adalah melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah Propinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat serta sebagian unit kerja BPS di Pusat.

Fungsi Inspektorat Wilayah I sebagaimana tercantum pada BAB X Bagian ketiga dalam pasal 102 yaitu:

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di Wilayah I;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana pelaksanaan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di Wilayah I

1.4 Tanggung Jawab dan Wewenang

Sesuai dengan pembagian area pengawasan yang tertuang dalam Surat Perintah Inspektur Utama tahun 2021, Inspektorat Wilayah I bertanggungjawab menjadi koordinator dalam kegiatan pengawasan Inspektorat Utama antara lain :

1. Probitas audit pengadaan barang dan jasa
2. Pembinaan dan Evaluasi SAKIP
3. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Disamping itu sesuai dengan wewenang dalam tugas pengawasan sebagai unit organisasi yang melakukan kegiatan penjaminan kualitas (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*), Inspektorat Wilayah I secara rutin melakukan kegiatan yang terdiri dari:

1. Audit Pengelolaan Keuangan Negara;
2. Audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi (Kinerja);
3. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) berupa Audit Investigasi;
4. Reviu Laporan Keuangan;
5. Reviu Laporan Kinerja;

6. Reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa (PB/J);
7. Reviu dokumen pengadaan barang/jasa sesuai tahapan;
8. Reviu dokumen kerjasama dengan pihak/instansi lain;
9. Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern (SPI On-Line);
10. Pemantauan/Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK;
11. *Liasion Officer* (LO) Pemeriksaan BPK;
12. Reformasi Birokrasi Instansi pilar pengawasan sub pilar gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan;
13. Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama;
14. Kegiatan konsultasi bidang pengawasan dengan Satker mitra sesuai yang tertuang dalam Program Auditor Mitra Satker (AMS).

Pada tahun 2021 ini , Inspektorat Wilayah I beserta seluruh Inspektorat Wilayah lainnya telah melakukan pembinaan atas Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Disamping itu, Inspektorat Wilayah I juga menjadi bagian dalam program arah perubahan BPS terbaru yang digagas oleh Kepala BPS untuk dapat meningkatkan peran melalui kegiatan penjaminan mutu maupun konsultasi, serta mendorong pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen risiko di seluruh unit organisasi BPS.

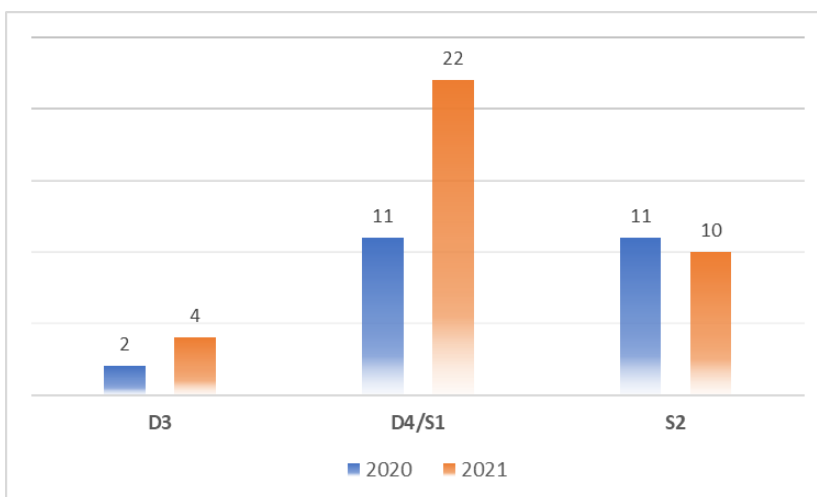
1.5 Sumber Daya Manusia Inspektorat Wilayah I

Sebagai faktor paling utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah I, sektor Sumber Daya Manusia (SDM) terus ditingkatkan kapasitasnya dari sisi kuantitas. Pada tahun 2021 ini, telah dilakukan penambahan jumlah pegawai di Inspektorat Wilayah I melalui perpindahan dari jabatan lain atau unit kerja lain sebanyak 9 orang. Kemudian terdapat pula penambahan CPNS sebanyak 2 orang, dan pegawai kembali dari cuti sebanyak 2 orang. Dengan demikian secara total jumlah pegawai di Inspektorat Wilayah I di tahun 2021 bertambah 13 orang. Sedangkan jumlah pegawai yang mutasi keluar sebanyak 1 orang, sehingga total pegawai di tahun 2021 bertambah dari 24 orang menjadi 36 orang.

Komposisi pegawai di Inspektorat Wilayah I baik dilihat dari jenjang pendidikan maupun jabatan fungsionanya sebagai berikut :

a. Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Jumlah pegawai menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

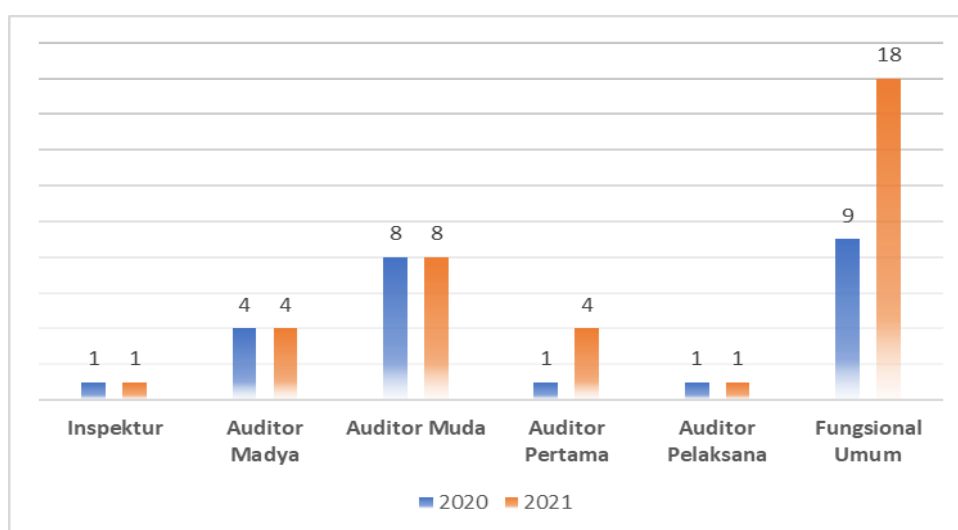


Gambar 1. Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat Wilayah I Tahun 2021

Pada tahun 2021 terdapat penambahan pegawai CPNS berlatar D3 Akuntansi sebanyak 2 orang, dan penambahan tenaga fungsional umum lulusan D4/S1 sebagai calon auditor sebanyak 9 orang pegawai. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan formal SDM Inspektorat Wilayah I sudah sangat baik.

b. Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Jabatan Fungsional Auditor

Di lingkungan Inspektorat Wilayah I terdapat 17 pegawai yang telah menjabat sebagai Fungsional Tertentu atau Fungsional Auditor, 18 pegawai sebagai Fungsional Umum, dan sisanya 1 pegawai sebagai Pejabat Struktural Inspektur. Untuk jabatan Fungsional Auditor, dibagi kedalam beberapa jenjang jabatan yaitu auditor pelaksana lanjutan, auditor pertama, auditor muda dan auditor madya. Komposisi pegawai Inspektorat Wilayah I menurut jenjang Jabatan Fungsional Auditor dirinci pada grafik di bawah ini:



Gambar 2. Jabatan Fungsional Pegawai Inspektorat Wilayah I

c. Kompetensi Pegawai

Peningkatan kompetensi SDM merupakan upaya agar kegiatan pengawasan di Inspektorat Wilayah I dapat dilakukan sesuai standar dan metode yang tepat. Melalui kegiatan Diklat pembentukan auditor bagi 8 pegawai yang baru akan mendapatkan sertifikat sebagai prasyarat untuk masuk ke dalam tim pemeriksa Inspektorat Wilayah I meskipun belum menjabat fungsional auditor. Disamping itu seluruh pegawai mendapat kesempatan untuk mengikuti Diklat teknis substantif di bidang pengawasan (19 orang), serta kegiatan sertifikasi audit intern pemerintah QGIA (4 orang).

1.6 Potensi dan Permasalahan

Identifikasi berbagai potensi yang telah dimiliki oleh Inspektorat Wilayah I sebagai berikut:

1. Inspektorat Wilayah I secara kelembagaan langsung di bawah Inspektorat Utama BPS;
2. Inspektorat Wilayah I telah memiliki Piagam Audit (*Audit Charter*), Standar Audit dan Kode Etik Auditor dalam pelaksanaan pengawasan internal;
3. Telah memiliki berbagai SOP dan Pedoman Pengawasan dan perlu dilakukan reviu secara berkala;
4. Inspektorat Utama sendiri telah memiliki berbagai layanan penunjang seperti Layanan Pengaduan secara online/*Whistle Blowing System (WBS)*, SPI Online, penggunaan aplikasi Surat Tugas Monita, dan Tim Auditor Mitra Satker (AMS);
5. Inspektorat Wilayah I dipercaya untuk mengawal pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di BPS, khususnya pada Pilar Penguatan Pengawasan sub pilar gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan;
6. Secara berkala melakukan pendampingan kepada Satker atau unit kerja pusat dalam pengadaan barang jasa maupun pemeriksaan BPK ;
7. Telah memiliki sumber daya auditor madya sebanyak 4 orang dan auditor muda sebanyak 8 orang, dan dibantu oleh auditor pertama kebawah sebanyak 23 orang.

Permasalahan yang berkaitan dengan Inspektorat Utama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut:

1. Pandemi Covid-19 menyebabkan terganggunya pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh Inspektorat Wilayah I sesuai program kerja karena pembatasan aktivitas. Akibatnya realisasi kegiatan pengawasan ke daerah menjadi berkurang atau tidak tepat waktu dari target yang telah ditentukan.
2. Kebijakan refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid-19 menyebabkan pemotongan anggaran. Secara umum kebijakan Pemerintah untuk

penghematan anggaran Kementerian dan Lembaga dan kebijakan Pimpinan BPS turut berdampak pada berkurangnya anggaran Inspektorat Wilayah I sehingga mempengaruhi beberapa rencana kegiatan, frekuensi serta pelaksanaannya dalam mendukung pencapaian target IKU.

3. Pelaksanaan diklat teknis/fungsional masih bergantung dari undangan instansi pelaksana (BPKP) sehingga tidak berimbang kebutuhan akan diklat dengan ketersediaan kuota peserta pelatihan.
4. Pelaksanaan beberapa pengawasan ada yang di luar perencanaan karena adanya kegiatan BPS yang *ad hoc* dan perlu pengawalan oleh APIP.
5. Belum optimalnya pengelolaan penyelesaian tindak lanjut oleh Inspektorat kepada satker/unit kerja atas hasil temuan Inspektorat Utama BPS dan BPK RI;
6. Hasil pengawasan belum efektif untuk menjadi bahan pengambilan keputusan.

1.7 Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja Inspektorat Wilayah I tahun 2021 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS; sumber daya manusia di Inspektorat Wilayah I, potensi dan permasalahan yang dihadapi Inspektorat Utama; serta sistematika penyajian laporan.

BAB II. Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Wilayah I Tahun 2021

BAB III. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah I tahun 2021, Perkembangan Capaian Kinerja Inspektorat Utama, Capaian Kinerja Inspektorat Utama terhadap Target Renstra 2020-2024 dan Realisasi Anggaran tahun 2021.

BAB IV. Penutup, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama 2020-2024

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Wilayah I sebagai bagian dari Inspektorat Utama BPS telah menetapkan pedoman kerja seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020-2024. Di dalam Renstra menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan pokok selama periode lima tahunan. Pada tahun 2021 ini merupakan periode kedua dalam pelaksanaan Renstra 2020-2024.

Visi Inspektorat Utama adalah “Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas”. Pernyataan visi tersebut mengandung arti bahwa Inspektorat Utama menempatkan diri sebagai mitra kerja dari seluruh satuan kerja/unit kerja di BPS untuk memberikan jaminan bahwa seluruh kegiatan BPS khususnya dalam penyelenggaraan statistik, dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

Visi tersebut dicapai dengan misi sebagai berikut:

1. *Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi;*

“Inspektorat Utama terus berupaya meningkatkan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS melalui pengawasan yang lebih terprogram dan berbasis pada risiko (*risk based audit*). Penjaminan kualitas yang dilakukan oleh Inspektorat Utama merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka pemberian keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan BPS khususnya penyelenggaraan statistik telah memenuhi standar yang ditetapkan dan telah sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif (3E)”.

2. *Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan;*

“Inspektorat Utama berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membangun ketaatan seluruh pihak di BPS terhadap peraturan perundang-undangan melalui berbagai kegiatan pengawasan intern, meliputi audit, revidu, evaluasi, monitoring, dan pengawasan lainnya. Inspektorat Utama memberikan keyakinan yang memadai bagi organisasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang yang berkualitas, transparan, dan akuntabel”.

3. *Meningkatkan profesionalisme dan integritas APiP;*

“Inspektorat Utama sebagai mitra kerja yang terpercaya wajib terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), assessment JFA, kursus, seminar, workshop, study banding, dan pelatihan di kantor

sendiri (PKS)/sharing knowledge. Selain itu, perlu terus meningkatkan integritasnya sebagai APIP dengan penerapan nilai-nilai inti BPS dan kode etik auditor dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewajibannya”.

VISI INSPEKTORAT UTAMA 2020-2024	Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas	MISI INSPEKTORAT UTAMA 2020-2024
		Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi
		Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan
		Meningkatkan profesionalisme dan integritas APIP
TUJUAN	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	

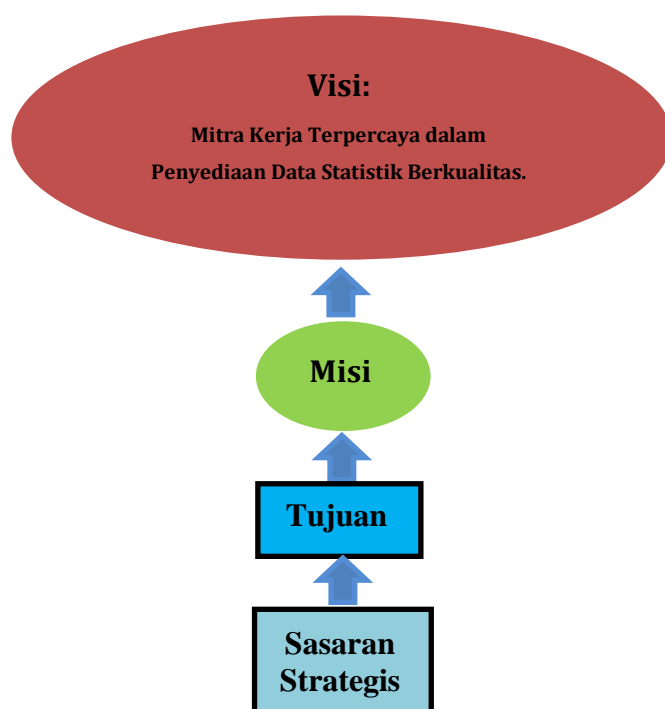
Gambar 3. Visi dan Misi Inspektorat Utama 2020-2024

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Inspektorat Utama 2020-2024, maka ditetapkan tujuan yang harus dicapai yang memiliki sasaran strategis pencapaian. Sasaran strategis dari tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama 2020-2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	SS.1 Meningkatkan efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS
	SS.2 Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel

Tujuan dan sasaran strategis pada tabel diatas memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya. Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama

Inspektorat Wilayah I merupakan bagian dari Inspektorat Utama. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah I Tahun 2020-2024 melekat pada Renstra Inspektorat Utama Tahun 2020-2024. Sehingga visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Inspektorat Wilayah I sama dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Inspektorat Utama.

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Wilayah I Tahun 2021

Pada awal tahun, ditetapkan target dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai selama setahun. Penetapan target tersebut tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021. Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2021

Tujuan/Sasaran Strategis	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Akuntabilitas	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari satker yang diperiksa)	Persen	96

Tujuan/Sasaran Strategis	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Kinerja Aparatur BPS	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	75
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I	Persen	94
	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	75
	Persentase satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persen	96
Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah I	Persen	95
	Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBK (dari jumlah satker keseluruhan)	Persen	13
	Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBBM (dari jumlah satker keseluruhan)	Persen	5
	Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya	Persen	60

Perjanjian Kinerja tahun 2021 merupakan pelaksanaan periode kedua dari Renstra 2020-2024. Target perjanjian kinerja 2021 sebagai komitmen untuk mencapai target Renstra 2020 yang sekaligus target kinerja jangka menengah. Keberhasilan pencapaian target-target tersebut menjadi tolak ukur kinerja Inspektorat Wilayah I dan memberi kontribusi signifikan pada kinerja Inspektorat Utama.

Realisasi target perjanjian kinerja dimonitoring setiap triwulanan yang dituangkan dalam form rencana aksi (FRA). Hasil monitoring tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan capaian kinerja triwulanan. Laporan tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan laporan kinerja. Keberhasilan/kegagalan pencapaian target dalam PK menjadi tanggung jawab Inspektur Wilayah I kepada Inspektur Utama atas penggunaan anggaran Inspektorat Wilayah I.

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2021

Capaian kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2021 merupakan pencapaian dari indikator-indikator sasaran strategis selama tahun 2021. Capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Reviu Terakhir). Ulasan capaian kinerja Inspektorat Wilayah I adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis

Inspektorat Wilayah I mempunyai satu tujuan dan dua sasaran strategis. Tujuannya yaitu “Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS”. Sedangkan sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS” serta “Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel”. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah:

Tabel 3. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2021

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan : Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS				
Sasaran : Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS				
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari Satker yang diperiksa)	Persen	96	100	104,17
Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	75	80,31	107,08
Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I	Persen	94	100	103,36
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	75	79,75	106,34

Persentase Satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persen	96	100	104,17
Sasaran: Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel				
Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah I	Persen	95	100	105,26
Persentase Satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai Satker WBK (dari jumlah keseluruhan)	Persen	13	34,97	120,00
Persentase Satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai Satker WBBM (dari jumlah keseluruhan)	Persen	5	6,13	120,00
Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya	Persen	60	54,17	90,28
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran				106,74

Dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja Sasaran (IKS), terdapat 8 (tujuh) indikator yang realisasinya memenuhi target yang ditetapkan dan masih terdapat 1 (satu) indikator yang tidak memenuhi target yaitu Indikator persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya. Walaupun demikian, secara rata-rata capaian dari 9 indikator kinerja tersebut telah diatas 100 persen yakni sebesar 106,74 persen.

Dari nilai capaian kedua sasaran strategis tersebut juga menunjukkan capaian tujuan dari Inspektorat Wilayah I yakni meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS telah tercapai dan menunjukkan kinerja sebesar 106,74 persen. Selanjutnya akan dijabarkan capaian kinerja dari masing-masing sasaran beserta indikator kinerja pada setiap sasaran strategis.

Sasaran 1 : Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS

IKS 1.1 : Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari Satker yang diperiksa)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari Satker yang diperiksa)	Persen	96	100	104,17

Pada tahun 2021, target indikator persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari Satker yang diperiksa) adalah 96 persen, sementara realisasinya sebesar 100 persen. Hal tersebut menunjukkan capaian kinerja sebesar 104,17 persen. Berdasarkan hasil capaian kinerja bisa dilihat bahwa pencapaian telah mencapai target.

Capaian diatas menunjukkan bahwa kegiatan *assurance* atau penjaminan mutu melalui audit pengelolaan keuangan negara telah berdampak pada minimnya tingkat kerugian negara yang ditemukan oleh tim auditor Inspektorat Wilayah I. Sepanjang tahun 2021 telah dilakukan 41 penugasan audit baik untuk satuan kerja BPS Provinsi/Kabupaten/Kota maupun unit organisasi BPS Pusat. Hasilnya keseluruhan satuan kerja tidak memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas 3% dari realisasi DIPA yang diaudit. Seluruh satuan kerja telah memahami tata kelola dalam pengelolaan negara sehingga mendukung penggunaan keuangan sesuai aturan yang berlaku. Informasi mengenai satuan kerja serta nilai penyimpangan kerugian negara terdapat pada lampiran laporan ini.

Meskipun capaian kinerja telah memenuhi target, namun masih terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi. Adapun kendala tersebut sebagai berikut:

Kendala:

1. Pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa kegiatan audit secara *field* yang sudah direncanakan tidak bisa dilaksanakan akibat pembatasan perjalanan serta pemotonga/refocusing anggaran yang kemudian digantikan dengan *desk* audit. Pada beberapa penugasan *desk* belum selesai hingga tahap evaluasi akhir sehingga rekomendasi belum ditetapkan;
2. Perubahan pengelola anggaran dan barang pada Satuan Kerja tanpa diikuti transfer knowledge yang memadai berpotensi menjadi kelemahan dalam pengelolaan keuangan Satker;
3. Adanya tumpang tindih kegiatan pengawasan dengan kegiatan-kegiatan Inspektorat Wilayah I lainnya yang menyebabkan pengawasan belum optimal;
4. Belum mempunyai mekanisme konsultasi yang terdokumentasi dengan baik sebagai pendukung kegiatan pemeriksaan dan pemberian nilai tambah kepada satuan kerja mitra.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, dilakukan beberapa upaya atau solusi sebagai berikut.

Solusi:

1. Hasil desk audit yang telah dilakukan agar diteruskan sampai dengan evaluasi akhir dan menyetujui rekomendasi walaupun secara on line/daring;
2. Meningkatkan koordinasi/pembinaan/sosialisasi kepada seluruh Satker atas peraturan yang berlaku, serta komunikasi bagi pengelola anggaran yang baru;
3. Memperbaiki kebijakan pengawasan dengan memaksimalkan matrik kegiatan pengawasan yang sistematis, jelas, dan seimbang kepada para Auditor;
4. Memanfaatkan peran Auditor Mitra Satker (AMS) yang bertanggungjawab di setiap Satker dalam rangka pelayanan konsultasi yang lebih baik.

IKS 1.2 : Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	75	80,31	107,08

Pada tahun 2021, Target kinerja indikator penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI sebesar 75 persen sementara realisasinya sebesar 80,31 persen. Hal ini menunjukkan, walaupun capaian kinerja sebesar 107,08 persen namun belum seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI telah selesai ditindaklanjuti oleh Satker/unit kerja. Untuk mencapai kinerja tersebut, terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi. Adapun kendala tersebut sebagai berikut.

Setiap tahun BPK selaku pemeriksa eksternal pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap BPS, dan memberikan rekomendasi atas temuan-temuan pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti oleh satuan/unit kerja yang bersangkutan. Sebagai mitra dari unit organisasi pusat yakni Kedepuyan Metodologi dan Informasi Stastik, Kedepuyan Distribusi dan Jasa, serta Politeknik STIS, dan Satuan Kerja BPS di 11 Provinsi seluruh Indonesia, Inspektorat Wilayah I berupaya meonitoring setiap rekomendasi BPK yang terkait unit-unit kerja dibawah Inspektorat Wilayah I. Penyampaian hasil tindak lanjut BPK sendiri dilakukan 2 kali periode semesteran setiap tahunnya. Hingga semester I tahun 2021, dari seluruh rekomendasi yang berjumlah 653, tindak lanjut yang sesuai rekomendasi sebanyak 512 atau 78,41%. Terdapat

19 temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah, sehingga total temuan yang telah selesai menjadi 531 atau 81,32%.

Sedangkan pada semester II, dari 701 temuan BPK, terdapat 544 rekomendasi yang selesai, dengan 19 temuan tidak dapat ditindaklanjuti sehingga capaian di semester II tahun 2021 sebesar 80,31%. Capaian ini mencerminkan pemantauan tindak lanjut dilakukan secara berkelanjutan walaupun jika dilihat secara rinci masih banyak temuan sampai tahun 2021 yakni 138 temuan yang belum selesai ditindaklanjuti. Dalam aktivitasnya pencapaian kinerja ini, masih terdapat kendala-kendala yakni :

Kendala:

1. Beberapa unit kerja/Satker belum merespon secara optimal hasil pembahasan monitoring tindak lanjut yang telah dilakukan dengan Tim Monitoring Tindak Lanjut sehingga penyelesaian tindak lanjut menjadi terhambat;
2. Adanya ketidakselarasan antara Satuan/Unit Kerja dalam memahami materi rekomendasi temuan yang dimaksud oleh Tim Monitoring BPK;
3. Tindak lanjut berupa penyusunan kebijakan/peraturan membutuhkan koordinasi antar beberapa Satuan/Unit Kerja terkait agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga membutuhkan waktu lebih lama;
4. Tindaklanjut yang melibatkan pihak lain dan memerlukan koordinasi yang tidak dapat diselesaikan dengan segera seperti penyetoran atas kekurangan volume pekerjaan oleh pihak penyedia barang/jasa, penyetoran yang bersifat tuntutan ganti rugi dan penyetoran atas temuan kelalaian penyedia lainnya;
5. Adanya pergantian personil dalam tim dan kurangnya koordinasi Tim Monitoring Tindak Lanjut Inspektorat Utama;

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Inspektorat Wilayah I melakukan beberapa upaya atau solusi agar target indikator kinerja tahun 2021 dapat tercapai. Berikut beberapa solusi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah I.

Solusi:

1. Membangun komunikasi yang baik dengan unit kerja/satker yang terkait dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sehingga diperoleh persepsi yang sama serta dapat disusun rencana tindak lanjut yang terealisasi.
2. Memberikan pemahaman yang sama atas rekomendasi temuan BPK kepada unit kerja terkait;
3. Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut berupa kebijakan/peraturan;

4. Melakukan koordinasi yang intensif antara Satuan/Unit Kerja dengan pihak penyedia yang belum menyelesaikan kewajiban penyetoran atas temuan BPK;
5. Meningkatkan koordinasi antara Tim Inspektorat Wilayah I dengan Tim monitoring BPK Inspektorat Utama agar memiliki pemahaman yang sama terhadap materi tindak lanjut rekomendasi temuan yang belum sesuai terutama kepada personil yang baru;

IKS 1.3 : Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I	Persen	94	97,16	103,36

Pada tahun 2021, capaian kinerja indikator tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti sebesar 103,36 persen. Hal ini menunjukkan sebagian besar rekomendasi Inspektorat atas temuan audit di tahun 2021 telah selesai ditindaklanjuti oleh Satker yang diaudit. Dari 41 kegiatan audit telah mengeluarkan sebanyak 774 rekomendasi, dan 97,16% persen atau 752 diantaranya telah selesai ditindaklanjuti. Rekomendasi Inspektorat merupakan upaya untuk meminimalkan kondisi yang tidak sesuai dengan aturan, kelemahan dalam pengendalian internal, serta meningkatkan *value for money* atas penggunaan keuangan negara. Untuk mencapai realisasi tersebut, terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi. Adapun kendala tersebut sebagai berikut.

Kendala:

1. Masih ditemui penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh auditan secara tepat waktu (14 hari kerja setelah evaluasi akhir);
2. Penyampaian laporan hasil pengawasan belum tersampaikan dengan baik kepada Satuan/Unit Kerja terkait menyebabkan kurangnya pemahaman atas materi temuan hasil audit yang disampaikan;
3. Terdapat rekomendasi atas hasil audit yang tidak memperhatikan tingkat kesulitan dalam penyelesaian tindak lanjutnya;
4. Monitoring Tindak lanjut hasil audit tidak otomatis menjadi penugasan setelah selesai penugasan audit dan belum ada tim yang secara khusus menangani monitoring tindak lanjut penyelesaian hasil audit Inspektorat Wilayah I;

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Inspektorat Wilayah I melakukan beberapa upaya atau solusi agar target indikator kinerja tahun 2021 dapat tercapai. Berikut beberapa solusi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah I.

Solusi:

1. Meningkatkan komunikasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan tindaklanjut kepada auditan (*monitoring*) sehingga penyelesaian tindaklanjut rekomendasi dapat tepat waktu;
2. Memastikan Satker auditan telah memahami segala rekomendasi yang ditetapkan dan membangun komunikasi melalui tim AMS apabila masih ada kesulitan dalam tindak lanjut;
3. Memperhatikan kesanggupan dan kemampuan Satker auditan saat memberi rekomendasi;
4. Menugaskan monitoring tindaklanjut pada tim yang melakukan audit dikarenakan belum ada mekanisme tim khusus untuk melakukan pemantauan tindak lanjut;

IKS 1.4 : Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	75	79,75	106,34

Pada tahun 2021, Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) ditargetkan sebesar 75 persen dengan realisasinya sebesar 79,75 persen. Hal tersebut menunjukkan capaian kinerja sebesar 106,34 persen. Dari total 163 Satker yang menjadi tanggungjawab Inspektorat Wilayah I, sebanyak 130 diantaranya telah memperoleh nilai B untuk implementasi SAKIP di tahun 2021. Daftar Satker yang telah mendapat nilai B dapat dilihat pada Lampiran. Untuk mencapai kinerja tersebut, ditemukan beberapa kendala dalam prosesnya yaitu:

Kendala:

1. Dalam pemenuhan dokumen evaluasi, masih terdapat Satker yang mengirimkan dokumen tidak tepat waktu;

2. Banyak Satker yang mengirimkan dokumen yang tidak sesuai dengan substansi dokumen yang diminta, hal ini menyebabkan penurunan nilai Satker yang cukup drastis dibandingkan dengan nilai hasil evaluasi tahun 2020;
3. Kurangnya pemahaman Satker terhadap dokumen evaluasi SAKIP yang diminta sehingga meskipun telah dilakukan perbaikan dan dikirimkan kembali untuk dapat meningkatkan nilai, masih belum sesuai. Hal tersebut mengakibatkan kegiatan panelisasi nilai SAKIP akhir membutuhkan waktu yang cukup lama;

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, dilakukan upaya atau solusi sebagai berikut.

Solusi :

1. Memperkuat peran AMS untuk mengingatkan Satker untuk mengirimkan dokumen sesuai dengan surat permintaan dokumen evaluasi atas Implementasi SAKIP 2021;
2. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan untuk persetujuan perbaikan dokumen form rencana aksi oleh Satker;
3. Dilaksanakannya Workshop Peningkatan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP tahun 2021 untuk seluruh Satker se-Indonesia. Workshop berisi pembahasan upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan Satker dalam mengoptimalkan hasil evaluasi 2021. Pada workshop, disampaikan hasil evaluasi sementara dan permasalahan umum implementasi SAKIP beserta penjelasan contoh dokumen. Kesepakatan hasil workshop berupa penambahan waktu Satker melakukan perbaikan atas dokumen yang dikirimkan sesuai dengan contoh yang dipaparkan serta mengirimkan kekurangan dokumen pendukung lain;
4. Dilakukannya survei evaluasi atas implementasi SAKIP yang menjangkau permasalahan implementasi SAKIP yang dihadapi tiap satker serta saran perbaikan kedepan yang hasilnya tertuang pada Laporan hasil survei evaluasi atas implementasi SAKIP 2021.
5. Tim Pereviu berkoordinasi langsung dengan penanggungjawab di BPS Provinsi yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan tindak lanjut atas catatan pereviu;
6. Tim Pereviu berkoordinasi langsung dengan penanggungjawab di BPS Kabupaten/Kota yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan tindak lanjut atas catatan pereviu guna mengurangi selisih penurunan nilai hasil evaluasi;

IKS 1.5 : Persentase Satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase Satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persen	96	100	104,17

Pada tahun 2021, capaian kinerja indikator jumlah Satker yang telah menyusun laporan Keuangan (LK) sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebesar 104,17 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Laporan Keuangan baik tingkat UAKPA/Satker maupun pada tingkat LK wilayah yang telah direviu oleh Inspektorat Wilayah I pada awal tahun 2021 seluruhnya dapat diyakini secara terbatas telah disusun sesuai dengan SAP. Kegiatan reviu LK itu sendiri dilakukan secara *desk* reviu. Mengingat tidak seluruh LK UAKPA direviu, maka reviu dilakukan kepada beberapa sampel terpilih yakni sebanyak 56 LK di tingkat Satker/UAKPA dan tingkat LK Wilayah. Daftar Laporan Keuangan yang dijadikan sampel untuk reviu dapat dilihat pada Lampiran. Untuk mencapai kinerja tersebut, ditemukan kendala dalam prosesnya antara lain sebagai berikut:

Kendala:

1. Masih banyak ditemui pergantian personil penyusun laporan keuangan, operator SAIBA, operator SIMAK dan persediaan sehingga berpotensi tidak maksimalnya transfer ilmu yang mengakibatkan penyusunan laporan keuangan kurang maksimal;
2. Catatan hasil reviu LK yang dihasilkan belum dimanfaatkan dalam penyusunan LK pada tahun anggaran berikutnya.
3. Belum adanya panduan dan tata kelola yang baku pada kegiatan reviu Laporan Keuangan BPS oleh Inspektorat Utama membuat tingkat pemahaman tim reviu menjadi berbeda-beda;

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, dilakukan upaya atau solusi sebagai berikut:

Solusi:

1. Meningkatkan pemahaman penyusun Laporan Keuangan Satker melalui komunikasi dengan tim AMS Inspektorat Wilayah I sehingga LK yang disusun sesuai dengan SAP;
2. Inspektorat Utama membuat resume catatan hasil reviu LK dan dikirimkan ke Satker sebagai referensi dalam menyusun LK sehingga tidak ditemui temuan yang berulang saat dilakukan reviu LK;

- Selalu mengadakan pelatihan di kantor untuk tim reviu LK setiap periode pelaksanaan reviu dan mengingatkan perubahan-perubahan kebijakan pelaporan keuangan dan teknis melakukan reviu;

Sasaran 2 : Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

IKS 2.1 : Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah I

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah I	Persen	95	100	105,26

Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPS tercermin dari peningkatan nilai RB pada setiap pilarnya. Inspektorat Wilayah I berperan dalam peningkatan nilai RB pilar penguatan pengawasan, khususnya sub pilar Gratifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan yang menjadi tanggung jawabnya. Target persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada sub Pilar Gratifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan (COI) untuk tahun 2021 adalah sebesar 95 persen dengan realisasi sebesar 100 persen sehingga capaian kinerja menjadi sebesar 105,26 persen. Tabel dibawah ini menunjukkan bahwa nilai RB pada sub pilar Gratifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan telah mencapai nilai maksimal berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal (TPI).

Tabel 4. Nilai Pilar Penguatan Pengawasan RB Instansi Tahun 2021

Sub Pilar		Bobot	Nilai TPI	Persentase (%)
1	Gratifikasi	0,30	0,30	100
2	Penanganan Benturan Kepentingan	0,30	0,30	100

Namun, untuk mencapai capaian tersebut, terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi.

Kendala:

- Belum ada standar dan prosedur baku untuk monitoring yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan penanganan benturan kepentingan dan pengendalian gratifikasi tersebut;

- Implementasi masih sebatas pemenuhan dokumen dan belum menjadi budaya organisasi yang dipahami oleh seluruh pegawai;

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, dilakukan upaya atau solusi yaitu menggiatkan kegiatan pengendalian gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan melalui sosialisasi aturan-aturan kepada Satker-Satker BPS, baik di pusat maupun di daerah, serta memonitoring pelaksanaan kegiatannya melalui mekanisme internal telah yang ditetapkan oleh tim.

IKS 2.2 : Persentase Satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai Satker WBK (dari jumlah keseluruhan)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase Satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai Satker WBK (dari jumlah keseluruhan)	Persen	13	34,97	120,00

Pada tahun 2021, Inspektorat Wilayah I menargetkan jumlah Satker berpredikat WBK sebanyak 22 dari 164 Satker atau sebesar 13 persen. Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal BPS, terdapat 57 Satker atau sebesar 34,76 persen di bawah pembinaan Inspektorat Wilayah I sebagai Satker WBK Tahun 2021. Daftar Satker yang mendapat predikat WBK dari tim penilai internal BPS dapat dilihat pada Lampiran.

Hasil penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kemenpan-RB menyatakan terdapat 6 Satker di bawah pembinaan Inspektorat Wilayah I yang menerima penghargaan zona integritas untuk kategori daerah Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu BPS Kabupaten Trenggalek, BPS Kabupaten Kediri, BPS Kabupaten Sidoarjo, BPS Kabupaten Mojokerto, BPS Kota Blitar dan BPS Kota Sorong. Hal ini tentu saja menjadikan pencapaian yang baik bagi Inspektorat Wilayah I dan BPS secara umum.

Dalam mencapai realisasi kinerja tersebut, ditemukan kendala sebagai berikut:

Kendala:

- Jumlah Satker yang dievaluasi cukup banyak dengan waktu desk evaluasi yang singkat ;
- Dari hasil pengecekan tindaklanjut atas hasil evaluasi, terdapat Satker yang masih belum memenuhi nilai minimal namun hanya kekurangan sedikit nilai, sehingga perlu dilakukan perbaikan/penambahan bukti dukung evaluasi;
- Perbedaan persepsi antar evaluator dalam melakukan desk evaluasi ZI;

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, dilakukan upaya atau solusi sebagai berikut.

Solusi :

1. Menyusun mekanisme *desk* evaluasi bersamaan dengan permintaan tindak lanjut ke Satker, tidak perlu menunggu semua satker selesai dilakukan evaluasi namun selesai satu satker dievaluasi pengendali teknis dapat langsung mengirimkan hasil evaluasi sementara untuk ditindaklanjuti oleh satker.
2. Dilakukan upaya khusus dengan menghubungi Satker dengan nilai hampir memenuhi syarat dan memiliki inovasi untuk menambahkan kembali bukti-bukti dukung untuk mencapai nilai minimal;
3. Dilakukan Pelatihan (PKS) dan dihibau untuk evaluator membaca secara mandiri buku pedoman pembangunan ZI yang telah tertuang contoh-contoh dokumen bukti dukung evaluasi;

IKS 2.3 : Persentase Satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai Satker WBBM (dari jumlah keseluruhan)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase Satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai Satker WBBM (dari jumlah keseluruhan)	Persen	5	6,13	120,00

Pada tahun 2021, Inspektorat Wilayah I menargetkan jumlah Satker berpredikat WBBM sebanyak 8 dari 163 Satker atau sebesar 5 persen. Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal BPS, terdapat 10 Satker yang diusulkan sebagai Satker WBBM Tahun 2021 yaitu BPS Provinsi Sumatera Barat, BPS Kota Bukittinggi, BPS Propinsi Sumatera Selatan, BPS Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Kabupaten Jember, BPS Kota Malang, BPS Propinsi Sulawesi Tenggara, BPS Kota Kendari, BPS Propinsi Sulawesi Barat. Hasil review oleh Tim Penilai Nasional (TPN) menyatakan Satker BPS Propinsi Jawa Timur menerima penghargaan zona integritas untuk kategori daerah Wilayah Bersih Bebas dan Melayani (WBBM) dari Kementerian PAN-RB.

Secara umum masih terdapat kendala-kendala saat evaluasi Satker menuju predikat WBBM dengan kondisi yang sama dengan evaluasi menuju predikat WBK pada penjelasan

indikator sebelumnya. Namun khusus untuk pencapaian menuju predikat WBBM juga ditemukan kendala lain yakni sebagai berikut:

Kendala:

1. Hasil survei eksternal sebagai upaya memperoleh predikat WBBM yang rendah;
2. Satker yang telah memperoleh predikat WBK belum mendapat pendampingan maksimal terutama untuk memenuhi aspek-aspek penting untuk dapat memenuhi kriteria menuju predikat WBBM yang lebih sulit untuk diperoleh;

Upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki capaian kinerja pada indikator ini ialah pendampingan/reviu secara lebih intensif dan prioritas terhadap Satker yang telah memperoleh WBK SK Kemenpan RB atau WBBM SK dari internal BPS agar berpredikat WBBM oleh TPN Kemenpan-RB.

IKS 2.4 : Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya	Persen	60	54,17	90,28

Pada tahun 2021, capaian kinerja indikator persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya ialah sebesar 90,28 persen. Jumlah auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya ialah sebanyak 13 auditor dari jumlah 24 yang ditargetkan. Capaian indikator ini diukur dengan menghitung jumlah auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya dibagi dengan jumlah auditor dikalikan dengan 100 persen. Capaian kinerja belum memperhitungkan pegawai yang baru masuk di Inspektorat Wilayah I baik CPNS maupun pegawai pindah karena program penawaran. Standar untuk auditor yang mengikuti diklat dan memperoleh sertifikat diklat pengawasan sesuai jenjangnya sebagai berikut:

- 1) Auditor Madya, minimal 10 sertifikat
- 2) Auditor Muda, minimal 7 sertifikat
- 3) Sampai dengan Auditor Pertama, minimal 5 sertifikat

Rincian jumlah auditor yang telah memenuhi syarat sesuai jenjangnya dapat dilihat pada Lampiran.

Evaluasi dari tidak tercapainya indikator ini dikarenakan terbatasnya pemanggilan Diklat dari BPKP untuk auditor Inspektorat Wilayah I akibat keterbatasan jadwal, serta perubahan anggaran karena adanya refocusing anggaran akibat pandemi Covid19.

Solusi yang akan dilakukan adalah merancang keperluan Diklat setiap auditor sesuai dengan kebutuhan Diklat per masing-masing auditor di setiap awal tahun sehingga bisa memberi prioritas Diklat pada masing-masing auditor sesuai kebutuhannya, serta memetakan kemungkinan Diklat pengawasan selain dari Pusdiklat Pengawasan BPKP. Hal ini juga sudah dilakukan seiring dengan kebijakan anggaran di akhir tahun 2021 sehingga terdapat penambahan pelaksanaan Diklat dan sertifikasi QGIA.

3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Tujuan Inspektorat Wilayah I adalah Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS. Untuk mencapai tujuan tersebut, Inspektorat Utama harus mencapai sasaran strategis, yaitu: “Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS” serta “Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel”. Dilihat dari capaian indikator, perkembangan capaian Kinerja tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 5. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Wilayah I Tahun 2020 – 2021

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	2020			2021		
		Tar get	Realis asi	Capaian Kinerja (%)	Tar get	Realis asi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tujuan : Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS							
Sasaran: Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS							
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari Satker yang diperiksa)	Persen	95	100	105,26	96	100	104,17
Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	75	68	90,67	75	80,31	107,08
Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I	Persen	95	90	94,74	94	97,16	103,36
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	75	68	90,99	75	79,75	106,34

Persentase Satker yang ditetapkan oleh Kepala Satker sebagai Satker WBK (dari jumlah Satker keseluruhan)	Persen	8	12	120,00			
Persentase Satker yang ditetapkan oleh Kepala Satker sebagai Satker WBBM (dari jumlah Satker keseluruhan)	Persen	4	4	100,00			
Persentase Satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persen	95	100	105,26	96	100	104,17
Sasaran: Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel							
Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah I	Persen	75	100	120	95	100	105,26
Persentase Satker yang ditetapkan oleh Kepala Satker sebagai Satker WBK (dari jumlah Satker keseluruhan)	Persen				13	34,97	120,00
Persentase Satker yang ditetapkan oleh Kepala Satker sebagai Satker WBBM (dari jumlah Satker keseluruhan)	Persen				5	6,13	120,00
Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya	Persen	50	50	100	60	54,17	90,28
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran				102,99			106,74

Berdasarkan tabel 4 di atas, rata-rata sasaran telah tercapai dengan tingkat capaian sebesar 106,74 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar capaian sasaran kinerja tahun 2021 sudah di atas 100 persen dan secara rata-rata capaian kinerja sasaran mengalami kenaikan sebesar 3,75 persen, di mana sebelumnya tahun 2020 rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai sebesar 102,99 persen. Meskipun terdapat beberapa Indikator Kinerja Sasaran (IKS) yang capaian di tahun 2021 lebih rendah, hal tersebut dikarenakan target 2021 yang lebih tinggi sementara capaian sudah maksimal di angka 100%.

Dari tabel juga terdapat perbedaan pada 2 (dua) indikator kinerja sasaran tahun 2020 dan 2021 yaitu pada indikator kinerja "Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah I yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satuan kerja WBK" dan "Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satuan kerja WBBM". Kedua indikator tersebut pada tahun 2020 merupakan indikator kinerja sasaran strategis "Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS" sedangkan pada tahun 2021 kedua indikator tersebut berubah menjadi indikator kinerja pada sasaran strategis "Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel".

Adapun rincian capaian Indikator Sasaran tahun 2021 dibandingkan dengan capaian tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Sasaran 1: Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS

IKS 1.1 : Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari Satker yang diperiksa)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020			2021		
		Targ et	Realis asi	Capaian Kinerja (%)	Targ et	Realis asi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari Satker yang diperiksa)	Persen	95	100	105,26	96	100	104,17

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka capaian indikator “Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari Satker yang diperiksa)” lebih rendah dibandingkan tahun 2020. Pada Tahun 2021, pencapaian kinerja sebesar 104,17 persen, sedangkan pada Tahun 2020 pencapaian kinerja mencapai 105,26 persen. Namun demikian realisasi dari indikator ini dalam dua tahun terakhir telah maksimal yakni 100% dari satuan/unit kerja BPS yang diaudit tidak memiliki kerugian negara diatas 3% dari realisasi DIPA. Hal ini menggambarkan proses penjaminan atas aktivitas pengelolaan keuangan negara baik melalui kegiatan audit ataupun reuiu terlaksana dengan baik dari tahun ke tahun.

IKS 1.2 : Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020			2021		
		Targ et	Realis asi	Capaian Kinerja (%)	Targ et	Realis asi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	75	68	90,67	75	81,32	108,43

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka capaian indikator “Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI” lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Pada Tahun 2021, pencapaian kinerja sebesar 108,43 persen, sedangkan pada Tahun 2020 pencapaian kinerja hanya mencapai 90,67 persen. Hal ini menunjukkan monitoring tindak lanjut atas pemeriksaan BPK yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Wilayah I telah dilakukan lebih intensif dengan melibatkan satuan kerja yang terkait dengan temuan BPK.

IKS 1.3 : Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020			2021		
		Tar get	Reali sasi	Capaian Kinerja (%)	Tar get	Realis asi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I	Persen	95	90	94,74	94	97,16	103,36

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka capaian indikator “Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I” lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Pada Tahun 2021, pencapaian kinerja sebesar 103,36 persen, sedangkan pada Tahun 2020 pencapaian kinerja mencapai 94,74 persen. Sebagai bagian dari pemantauan hasil pengawasan, Inspektorat Wilayah I selalu ingin memastikan bahwa rekomendasi hasil audit telah dilakukan. Dari seluruh satuan kerja yang diaudit, pemantauan tindak lanjut perlu terus dipertahankan supaya nilai tambah dari hasil audit dapat diimplementasikan oleh Satker auditan.

IKS 1.4 : Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020			2021		
		Tar get	Reali sasi	Capaian Kinerja (%)	Tar get	Realis asi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP	Persen	75	68	90,99	75	79,75	106,34

berkategori baik (minimal B)							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka capaian indikator “Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)” lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Pada Tahun 2021, pencapaian kinerja sebesar 106,34 persen, sedangkan pada Tahun 2020 pencapaian kinerja hanya mencapai 90,99 persen. Hal ini menunjukkan semakin baiknya implementasi SAKIP pada Satker di BPS Prov/Kab/Kota. Tentu saja dengan semakin baiknya implementasi SAKIP akan mendukung capaian reformasi birokrasi bagi BPS secara umum.

IKS 1.5 : Persentase Satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Persentase Satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persen	95	100	105,26	96	100	104,17

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka capaian indikator “Persentase Satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah” lebih rendah dibandingkan tahun 2020. Hal ini dikarenakan terdapat peningkatan target. Jika dibandingkan, target tahun sebelumnya (tahun 2020) adalah 95%, sedangkan di tahun 2021 targetnya adalah 96%, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi persentase capaian. Pada Tahun 2021, pencapaian kinerja sebesar 104,17 persen, sedangkan pada Tahun 2020 pencapaian kinerja mencapai 105,26 persen.

Sasaran 2 : Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

IKS 2.1 : Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah I

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020			2021		
		Tar get	Realis asi	Capaian Kinerja (%)	Tar get	Realis asi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sasaran: Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS							
Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah I	Persen	75	100	120			
Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah I	Persen				95	100	105,26

Tahun 2020, indikator diatas digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPS yakni "Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada sub pilar Gratifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan (COI)" dengan capaian sebesar 120,00 persen. Tahun 2021 sejalan dengan rewiu Renstra 2020-2024 terdapat perubahan redaksi pada indikator ini menjadi "Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah I". Pada dasarnya kedua indikator masih sama dan dapat dibandingkan karena tanggung jawab Inspektorat Wilayah I masih pada kedua sub pilar yang sama. Capaian kinerja indikator ini sebesar 105,26 persen pada tahun 2021, dengan realisasi tetap pada nilai maksimal sama dengan tahun 2020.

IKS 2.2 : Persentase Satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai Satker WBK (dari jumlah Satker keseluruhan)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020			2021		
		Tar get	Realis asi	Capaian Kinerja (%)	Tar get	Realis asi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sasaran: Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS							
Persentase Satker yang ditetapkan oleh Kepala Satker sebagai Satker WBK (dari jumlah Satker keseluruhan)	Persen	8	12	120,00			
Persentase Satker yang ditetapkan oleh Kepala	Persen				13	34,97	120,00

Satker sebagai Satker WBK (dari jumlah Satker keseluruhan)							
--	--	--	--	--	--	--	--

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka capaian indikator “Persentase Satker yang ditetapkan oleh Kepala Satker sebagai Satker WBK (dari jumlah Satker keseluruhan)” adalah sama, yaitu 120,00. Namun terdapat peningkatan target dari indikator “Persentase Satker yang ditetapkan oleh Kepala Satker sebagai Satker WBK (dari jumlah Satker keseluruhan)”. Pada tahun 2020, target dari indikator ini adalah 8 persen, sedangkan pada tahun 2021 target untuk indikator ini adalah 13 persen. Peningkatan target ini dikarenakan pada tahun sebelumnya realisasi mencapai 12 persen dari target yang hanya 8 persen.

IKS 2.3 : Persentase Satker yang ditetapkan oleh Kepala Satker sebagai Satker WBBM (dari jumlah Satker keseluruhan)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Persentase Satker yang ditetapkan oleh Kepala Satker sebagai Satker WBBM (dari jumlah Satker keseluruhan)	Persen	4	4	100,00	5	6,10	120,00

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka capaian indikator “Persentase Satker yang ditetapkan oleh Kepala Satker sebagai Satker WBBM (dari jumlah Satker keseluruhan)” lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Pada Tahun 2021, pencapaian kinerja sebesar 120,00 persen, sedangkan pada Tahun 2020 pencapaian kinerja mencapai 100 persen.

IKS 2.4 : Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Persentase auditor yang telah memenuhi standar	Persen	50	50	100,00	60	54,17	90,28

sertifikasi pengawasan jenjangnya	diklat sesuai							
---	------------------	--	--	--	--	--	--	--

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka capaian indikator “Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya” lebih rendah dibandingkan tahun 2020. Pada Tahun 2021, pencapaian kinerja hanya sebesar 90,28 persen, sedangkan pada Tahun 2020 pencapaian kinerja telah mencapai 100 persen. Penurunan capaian indikator ini terjadi karena tidak tercapainya jumlah auditor yang dapat memenuhi standar sesuai jenjangnya. Pada tahun 2020, targetnya adalah sebesar 50 persen dengan capain 12 orang auditor telah memenuhi syarat dari total 24 auditor (100 persen), sedangkan di tahun 2021 targetnya adalah sebesar 60 persen namun hanya bertambah 1 orang auditor menjdai 13 orang dari total 24 auditor dengan realisasi hanya 54,17 persen. Hal ini menjadi perhatian khusus dalam mencapai target untuk tahun yang akan datang.

3.3 Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra 2021-2024

**Tabel 6. Capaian Kinerja 2021 terhadap Target Renstra
Inspektorat Wilayah I Tahun 2024**

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Realisasi 2021	Target 2024	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan : Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS				
Sasaran : Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS				
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari Satker yang diperiksa)	Persen	100	100	100
Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,31	95	84,53
Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I	Persen	97,16	100	97,16
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	79,75	95	83,95
Persentase Satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persen	100	100	100
Sasaran: Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel				
Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah I	Persen	100	90	111,11

Persentase Satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai Satker WBK (dari jumlah keseluruhan)	Persen	34,97	16	120
Persentase Satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai Satker WBBM (dari jumlah keseluruhan)	Persen	6,13	8	76,62
Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya	Persen	54,17	75	72,22
RATA – RATA CAPAIAN KINERJA				93,95

Berdasarkan hasil analisis perbandingan pada tabel 5 diatas, secara rata-rata capaian realisasi IKU Tahun 2021 terhadap target tahun 2024 sudah cukup baik mencapai 93,95 persen. Namun masih terdapat 2 (dua) IKU dengan pencapaian pada tahun 2021 yang belum optimal dan perlu mendapat perhatian agar dapat tercapai pada perencanaan tahun yang akan datang yaitu IKU " Persentase Satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai Satker WBBM (dari jumlah keseluruhan)" dan IKU "Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya" dengan capaian kinerja masing-masing sebesar 76,62 persen dan 72,22 persen.

Pada beberapa indikator kinerja yang terkait kegiatan audit Inspektorat Wilayah I seperti pada persentase Satker yang mempunyai penyimpangan kerugian negara dan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pada dasarnya telah tercapai target tahun 2024, sehingga perlu dipertahankan kinerjanya. Demikian pula untuk indikator persentase Satker yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP, yang tiap tahunnya telah tercapai 100%. Sedangkan untuk indikator Satker yang memperoleh predikat WBK, dikarenakan telah melampaui target 2024, maka perlu penajaman target kembali di Renstra Inspektorat Wilayah I. Hal ini disebabkan semakin banyaknya Satker yang mencanagkan melaksanakan Zona Integritas dan lolos untuk dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional.

Untuk indikator persentase unit kerja dengan nilai SAKIP minimal B juga perlu mendapat perhatian mengingat target di tahun 2024 nanti sebanyak 95%. Evaluasi SAKIP dari tahun ke tahun menemui hambatan antara lain pada cukup banyaknya lembar kerja evaluasi yang harus diisi, proses panelisasi hingga pemberian nilai. Dengan membawahi 163 Sarker dengan tim yang tersedia, maka perlu usaha ekstra untuk menyelesaikan proses evaluasi. Hambatan lain adalah masih banyak Satker yang tidak memasukkan dokumen evaluasi sehingga tim perlu mengkonfirmasi ulang supaya proses evaluasi dapat dilaksanakan secara obyektif. Jika melihat persentase target di tahun 2024 maka jumlah Satker nantinya ditargetkan sebanyak 154 Satker atau bertambah 24 Satker dari capaian di tahun 2021. Tantangan lain adalah bagaimana tetap mempertahankan Satker yang telah

mendapat nilai B supaya tidak menurun, dengan pembinaan berkelanjutan melalui setiap AMS mitra Satker.

2.4 Prestasi Tahun 2021

Selama tahun 2021, Inspektorat Wilayah I belum memperoleh penghargaan baik dari internal maupun eksternal.

2.5 Realisasi Anggaran Tahun 2021

Pagu yang diberikan ke Inspektorat Wilayah I untuk menjalankan fungsinya selama tahun 2021 adalah sebesar Rp1.119.547.000,- dengan realisasi mencapai 93,95 persen atau sebesar Rp1.051.787.677,-.

Tabel 7. Pagu dan Realisasi Anggaran 2021 Per Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari Satker yang diperiksa)	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Audit	946.077.000	881.628.957
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Penyelesaian Tindak Lanjut pemeriksaan BPK	-	-
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Audit	-	-
	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	-	-
	Persentase Satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP	Reviu Laporan Keuangan	-	-
Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah I	Reformasi Birokrasi Instansi Pilar Penguatan Pengawasan	-	-
	Persentase Satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai Satker WBK (dari jumlah keseluruhan)	Evaluasi Satker Zona Integritas menuju WBK	39.970.000	39.158.720

	Persentase Satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai Satker WBBM (dari jumlah keseluruhan)	Evaluasi Satker Zona Integritas menuju WBBM		
	Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya	Diklat teknis bidang pengawasan dan peningkatan kompetensi	133.500.000	131.000.000

Dalam pelaksanaan anggaran di tahun 2021 Inspektorat Wilayah I belum dapat memaksimalkan keseluruhan anggaran. Hal ini disebabkan kebijakan pembatasan kegiatan akibat pandemi sepanjang tahun 2021 mengingat penganggaran terbesar adalah untuk kegiatan audit di Satker BPS daerah yang berada dibawah Inspektorat Wilayah I. Disamping itu pada akhir tahun 2021, terdapat kendala ketidakselarasan antara data realisasi anggaran dengan data pada aplikasi *back office* BPS saat dilakukan revisi anggaran, hal ini menyebabkan sisa anggaran tidak dapat dimonitoring dengan tepat dan tidak dapat terserap sesuai rencana khususnya pada komponen anggaran audit. Sedangkan pada komponen lainnya telah terserap dengan optimal.

2.6 Upaya Efisiensi Inspektorat Utama Tahun 2021

Inspektorat Wilayah I telah melakukan banyak kegiatan untuk mencapai kinerja yang ditetapkan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Sebagai bagian dari mengedepankan prinsip efektif dan efisien, Inspektorat Wilayah I terus melakukan upaya efisiensi :

1. Memaksimalkan kegiatan pemeriksaan melalui metode *desk* atau memeriksa dokumen secara jarak jauh melalui teknologi yang tersedia. Hal ini dapat mengurangi penggunaan anggaran perjalanan dinas ataupun memaksimalkan waktu perjalanan dinas sehingga diperoleh output yang lebih banyak. Beberapa kegiatan pengawasan yang telah dilakukan secara desk adalah :
 - a. Desk Audit Pengelolaan Keuangan Negara;
 - b. Desk Audit Pembangunan Gedung Kantor;
 - c. Desk Reviu Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020;
 - d. Desk Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2021;
 - e. Desk Evaluasi Zona Integritas Satker menuju WBK/WBBM;

Disamping sebagai upaya mengurangi interaksi akibat kondisi pandemi Covid19, penggunaan metode desk sebagai upaya memaksimalkan penugasan assurance dan dapat memberikan tambahan keyakinan kepada tim auditor atas obyek pengawasan.

Dilihat dari sisi anggaran, pada komponen Reviu dan Evaluasi telah menurun dibandingkan tahun 2020 yang lalu. Bahkan untuk komponen reviu, Inspektorat Wilayah I tidak merealisasikan anggaran di tahun 2021 ini, sementara di tahun 2020 menggunakan anggaran sebesar Rp270.242.400,-. Dengan memperhatikan ketercapaian target pada indikator persentase satuan kerja yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP yang telah tercapai 100%, maka Inspektorat Wilayah I telah melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja tersebut.

2. Tingkat efisiensi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah I dapat pula disajikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Dari sudut pandang efektivitas, maka kinerja pencapaian sasaran Inspektorat Wilayah I terhadap penggunaan sumber daya dapat dikategorikan telah efisien. Hal tersebut tercermin dari output yang dapat dicapai dengan anggaran yang tersedia. Untuk mencapai tujuan “Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas kinerja aparatur BPS” berdasarkan realisasi anggaran terdapat efisiensi sebesar 13,94 persen. Perhitungan efisiensi disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 8. Perbandingan Efisiensi Menurut Tujuan dan Sasaran Tahun 2021

Tujuan/ Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Pagu TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tujuan : Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas kinerja aparatur BPS	106,89	1.119.547.000	1.051.787.677	93,95	13,94
SS : Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	105,29	946.077.000	881.628.957	93,19	13,10
SS : Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	108,88	173.470.000	170.158.720	98,09	11,79

3. Efisiensi lainnya yang dilakukan Inspektorat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, antara lain:
 - a. Menghemat penggunaan listrik dengan memaksimalkan penggunaan laptop daripada PC;
 - b. Tidak lagi melakukan aktivitas di kantor diluar jam kerja sehingga menghemat penggunaan listrik dan AC;
 - c. Memaksimalkan penggunaan aplikasi pendukung surat/memorandum penugasan sehingga menghemat penggunaan alat tulis kantor;

BAB 4 PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum

Secara keseluruhan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Wilayah I tahun 2021 telah tercapai, dengan rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran sebesar 106,74 persen. Terdapat upaya-upaya peningkatan kinerja yang terus dilakukan oleh Inspektorat Wilayah I, terutama pada pencapaian indikator persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya.

4.2. Tindak Lanjut

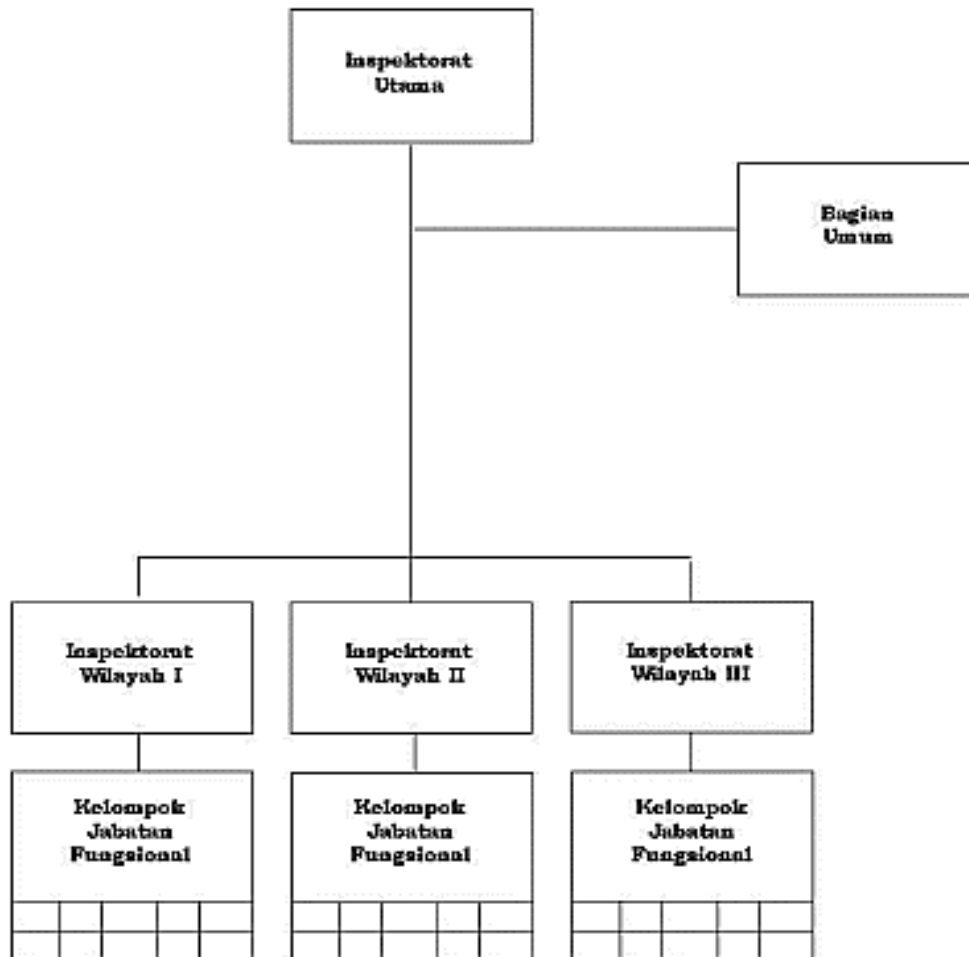
Tindak lanjut yang dilakukan guna perbaikan di tahun mendatang antara lain adalah :

1. Memaksimalkan penyusunan rencana audit dan program kerja pengawasan tahunan yang mendukung tercapainya target penilaian kinerja Inspektorat Wilayah I dan memastikan peran dan fungsi Inspektorat Wilayah I terealisasi dengan baik termasuk rancangan peningkatan kompetensi auditor.
2. Merancang keperluan Diklat setiap auditor dengan mengidentifikasi untuk setiap pegawai dan disesuaikan dengan kebutuhan diklat per masing-masing auditor di awal tahun, serta memberi prioritas diklat pada masing-masing auditor sebagai bagian dari pemberian penghargaan.

LAMPIRAN

Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPS

(Sesuai Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik)



**Target Kinerja pada Renstra (Reviu 1) Inspektorat Wilayah I
Tahun 2020 - 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	TARGET KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
Inspektorat Wilayah I						
Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari satker yang diperiksa)	95	95	95	100	100
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	75	80	85	90	95
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I	95	95	95	100	100
	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	75	80	85	90	95
	Persentase satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	95	95	100	100	100
Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada sub pilar Gratifikasi dan Penanganan Benturan kepentingan (COI)	75	79	83	87	90
	Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBK (dari jumlah satker keseluruhan)	8	10	12	14	16
	Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBBM (dari jumlah satker keseluruhan)	4	5	6	7	8
	Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya	50	55	70	80	87

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Tujuan/Sasaran Strategis	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari satker yang diperiksa)	Persen	96
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	75
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I	Persen	94
	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	75
	Persentase satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persen	96
Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel yang dan	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah I	Persen	95
	Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBK (dari jumlah satker keseluruhan)	Persen	13
	Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBBM (dari jumlah satker keseluruhan)	Persen	5
	Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya	Persen	60

Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2021 per Triwulan

Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari satker yang diperiksa)	Persen	TW I	8	7,69	96,12
			TW II	16	15,38	96,12
			TW III	60	26,92	44,86
			TW IV	96	100	104,17
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	TW I	0	0	0
			TW II	0	0	0
			TW III	70	70	93,33
			TW IV	80,31	80,31	107,08
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I	Persen	TW I	60	75	79,78
			TW II	75	83,5	88,83
			TW III	87	89,1	94,78
			TW IV	94	97,16	103,36
	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	TW I	0	0	0
			TW II	0	0	0
			TW III	0	0	0
			TW IV	75	79,75	106,33
	Persentase satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persen	TW I	96	100	104,17
			TW II	96	100	104,17
			TW III	96	100	104,17
			TW IV	96	100	104,17
Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan	Persen	TW I	0	0	0
			TW II	0	0	0

Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah I		TW III	0	0	0
			TW IV	95	100	105,26
	Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBK (dari jumlah keseluruhan)	Persen	TW I	0	0	0
			TW II	0	0	0
			TW III	13	37,42	120
			TW IV	13	34,97	120
	Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBBM (dari jumlah satker keseluruhan)	Persen	TW I	0	0	0
			TW II	0	0	0
			TW III	5	6,75	120
			TW IV	5	6,13	120
	Persentase auditor yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya	Persen	TW I	50	28,5	47,5
			TW II	50	30,95	51,58
			TW III	60	30,95	51,58
			TW IV	60	54,17	90,28

Daftar Satuan Kerja Inspektorat Wilayah I Yang Diaudit Tahun 2021

No	Satker/Unit Organisasi Yang Dilakukan Audit	Persentase Temuan Kerugian Negara Terhadap DIPA
1	BPS Provinsi Kalimantan Selatan	0,01%
2	BPS Kota Banjarbaru	0,00%
3	BPS Provinsi Jawa Timur	0,00%
4	BPS Kota Surabaya	0,00%
5	BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan	0,08%
6	BPS Kabupaten Tanah Bumbu	0,06%
7	BPS Kabupaten Kolaka Timur	0,00%
8	BPS Kota Kendari	0,02%
9	BPS Kota Prabumulih	0,01%
10	BPS Kabupaten Ogan Ilir	0,03%
11	Direktorat Sistem Informasi Statistik (SIS)	0,00%
12	Direktorat Diseminasi Statistik (DDS)	0,00%
13	BPS Kabupaten Kolaka Timur - Pembangunan Gedung	0,00%
14	BPS Kota Tanjung Pinang	0,00%
15	BPS Kota Batam	0,04%
16	BPS Provisin Sulawesi Barat	0,00%
17	BPS Kabupaten Mamuju	0,08%
18	Direktorat Distribusi - PBJ	0,09%
19	BPS Kota Banyuwangi	0,04%
20	BPS Kota jember	0,01%
21	BPS Kabupaten Nganjuk	0,01%
22	BPS Kabupaten Kediri	0,00%
23	BPS Kabupaten Sumenep	0,03%
24	BPS Kabupaten Pamekasan	0,26%
25	Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS)	0,00%
26	Direktorat Statistik Harga	0,00%
27	BPS Kabupaten Agam	0,02%
28	BPS Kabupaten Lima Puluh Kota	0,18%
29	BPS Kabupaten Mentawai	0,07%
30	BPS Kota Padang	0,04%
31	BPS Kabupaten Tanah Datar	0,07%
32	BPS Kota Sawah Lunto	0,00%
33	BPS Kabupaten Probolinggo	0,07%
34	BPS Kabupaten Sidoarjo	0,03%
35	BPS Kabupaten Tuban	0,03%
36	BPS Kabupaten Ngawi	0,01%
37	BPS Kabupaten Ponorogo	0,03%
38	BPS Kabupaten Malang	0,05%
39	BPS Provinsi D.I Yogyakarta	0,00%
40	Politeknik Statistika STIS	0,00%
41	Politeknik Statistika STIS - Penerimaan Mahasiswa baru	0,00%

Daftar Nama Satker Yang Mendapatkan Predikat WBK dan WBBM

(Berdasarkan SK Kepala BPS RI Nomor 391/Tahun 2021)

I. Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. BPS Kabupaten Padang Pariaman | 31. BPS Kabupaten Jombang |
| 2. BPS Kabupaten Agam | 32. BPS Kabupaten Nganjuk |
| 3. BPS Kabupaten Limapuluh Kota | 33. BPS Kabupaten Madiun |
| 4. BPS Kabupaten Pasaman Barat | 34. BPS Kabupaten Magetan |
| 5. BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir | 35. BPS Kabupaten Ngawi |
| 6. BPS Kabupaten Muara Enim | 36. BPS Kabupaten Bojonegoro |
| 7. BPS Kabupaten Banyuasin | 37. BPS Kabupaten Sampang |
| 8. BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | 38. BPS Kabupaten Sumenep |
| 9. BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | 39. BPS Kota Kediri |
| 10. BPS Kota Palembang | 40. BPS Kota Blitar |
| 11. BPS Kabupaten Bangka | 41. BPS Kota Probolinggo |
| 12. BPS Kabupaten Bangka Barat | 42. BPS Kota Pasuruan |
| 13. BPS Kabupaten Bangka Tengah | 43. BPS Kota Mojokerto |
| 14. BPS Kabupaten Bangka Selatan | 44. BPS Kota Surabaya |
| 15. BPS Kabupaten Belitung Timur | 45. BPS Provinsi Kalimantan Selatan |
| 16. BPS Kota Pangkalpinang | 46. BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah |
| 17. BPS Provinsi Kepulauan Riau | 47. BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| 18. BPS Kota Batam | 48. BPS Kota Banjarmasin |
| 19. BPS Provinsi DI Yogyakarta | 49. BPS Kabupaten Muna |
| 20. BPS Kabupaten Ponorogo | 50. BPS Kabupaten Konawe |
| 21. BPS Kabupaten Trenggalek | 51. BPS Kabupaten Kolaka |
| 22. BPS Kabupaten Kediri | 52. BPS Kabupaten Buton Utara |
| 23. BPS Kabupaten Malang | 53. BPS Kabupaten Konawe Utara |
| 24. BPS Kabupaten Lumajang | 54. BPS Kabupaten Majene |
| 25. BPS Kabupaten Banyuwangi | 55. BPS Kabupaten Polewali Mandar |
| 26. BPS Kabupaten Bondowoso | 56. BPS Kabupaten Pasangkayu |
| 27. BPS Kabupaten Situbondo | 57. BPS Kota Sorong |
| 28. BPS Kabupaten Pasuruan | |
| 29. BPS Kabupaten Sidoarjo | |
| 30. BPS Kabupaten Mojokerto | |

II. Unit Kerja Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. BPS Provinsi Sumatera Barat | 7. BPS Kota Bukittinggi |
| 2. BPS Provinsi Sumatera Selatan | 8. BPS Kota Madiun |
| 3. BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 9. BPS Kota Malang |
| 4. BPS Provinsi Jawa Timur | 10. BPS Kabupaten Jember |
| 5. BPS Provinsi Sulawesi Barat | 11. BPS Kota Kendari |
| 6. BPS Provinsi Sulawesi Tenggara | |

**Daftar Satker BPS Prov/Kab/Kota di bawah Pembinaan Inspektorat Wilayah 1
Dengan Nilai SAKIP “B”**

No.	Satker BPS Prov/Kab/Kota	Nilai SAKIP	Kategori
1	Prov. Sumatera Barat	64,07	B
2	Kepulauan Mentawai	62,99	B
3	Solok	60,12	B
4	Sawah Lunto/Sijunjung	61,17	B
5	Tanah Datar	62,93	B
6	Padang Pariaman	64,56	B
7	Agam	64,48	B
8	Lima Puluh Koto	61,30	B
9	Pasaman Barat	66,67	B
10	Kota Sawah Lunto	63,34	B
11	Kota Bukit Tinggi	67,26	B
12	Prov. Sumatera Selatan	76,55	BB
13	Ogan Komering Ulu	64,25	B
14	Ogan Komering Ilir	67,86	B
15	Muara Enim	65,25	B
16	Lahat	62,55	B
17	Musi Rawas	62,49	B
18	Musi Banyuasin	64,35	B
19	Banyuasin	67,59	B
20	OKU Selatan	64,02	B
21	OKU Timur	67,91	B
22	Ogan Ilir	60,28	B
23	Kab. Empat Lawang	66,10	B
24	Palembang	69,88	B
25	Prabumulih	65,23	B
26	Pagar Alam	62,72	B
27	Lubuk Linggau	64,65	B
28	Prov. Kep. Bangka Belitung	71,95	BB
29	Bangka	60,64	B
30	Belitung	62,72	B
31	Bangka Barat	60,54	B
32	Bangka Tengah	61,58	B
33	Bangka Selatan	60,64	B
34	Belitung Timur	62,12	B
35	Kota Pangkal Pinang	62,49	B
36	Prov. Kepulauan Riau	71,61	BB
37	Natuna	61,79	B
38	Lingga	62,77	B
39	Kepulauan Anambas	60,96	B
40	Kota Tanjung Pinang	62,67	B

41	Prov. D.I. Yogyakarta	66,39	B
42	Kulon Progo	65,90	B
43	Bantul	68,65	B
44	Gunung Kidul	67,16	B
45	Sleman	64,80	B
46	Kota Yogyakarta	63,33	B
47	Prov. Kalimantan Selatan	73,98	BB
48	Tanah Laut	66,70	B
49	Kota Baru	64,21	B
50	Banjar	62,44	B
51	Barito Kuala	62,10	B
52	Tapin	69,25	B
53	Hulu Sungai Selatan	63,54	B
54	Hulu Sungai Tengah	68,78	B
55	Hulu Sungai Utara	67,50	B
56	Tabalong	61,46	B
57	Tanah Bumbu	62,79	B
58	Balangan	62,71	B
59	Kota Banjarmasin	68,20	B
60	Kota Banjar Baru	62,91	B
61	Prov. Jawa Timur	74,19	BB
62	Pacitan	62,82	B
63	Ponorogo	66,67	B
64	Trenggalek	61,29	B
65	Tulungagung	60,61	B
66	Blitar	64,30	B
67	Kediri	65,09	B
68	Malang	66,44	B
69	Lumajang	62,73	B
70	Jember	61,13	B
71	Banyuwangi	67,52	B
72	Bondowoso	61,92	B
73	Situbondo	64,26	B
74	Probolinggo	62,76	B
75	Pasuruan	64,98	B
76	Sidoarjo	63,61	B
77	Mojokerto	64,98	B
78	Jombang	65,25	B
79	Nganjuk	60,53	B
80	Madiun	62,64	B
81	Magetan	62,12	B
82	Ngawi	61,14	B
83	Bojonegoro	63,84	B
84	Tuban	60,23	B
85	Lamongan	65,04	B
86	Gresik	62,19	B

87	Bangkalan	60,46	B
88	Sampang	60,13	B
89	Pamekasan	62,14	B
90	Sumenep	63,06	B
91	Kota Kediri	65,88	B
92	Kota Blitar	72,44	BB
93	Kota Malang	61,15	B
94	Kota Probolinggo	62,35	B
95	Kota Pasuruan	61,51	B
96	Kota Mojokerto	63,75	B
97	Kota Madiun	68,81	B
98	Kota Surabaya	63,66	B
99	Kota Batu	60,48	B
100	Prov. Sulawesi Tenggara	76,28	BB
101	Buton	66,88	B
102	Muna	69,51	B
103	Konawe	67,24	B
104	Kolaka	65,88	B
105	Konawe Selatan	67,99	B
106	Bombana	65,28	B
107	Wakatobi	68,08	B
108	Kolaka Utara	65,38	B
109	Kab. Buton Utara	68,51	B
110	Kab. Konawe Utara	69,95	B
111	BPS Kabupaten Kolaka timur	64,50	B
112	Kota Kendari	69,20	B
113	Kota Baubau	64,04	B
114	Prov. Sulawesi Barat	74,67	BB
115	Majene	60,48	B
116	Polewali Mandar	67,26	B
117	Mamasa	60,21	B
118	Mamuju	63,77	B
119	Mamuju Utara (Pasang Kayu)	62,78	B
120	Prov. Papua Barat	70,62	BB
121	Kaimana	66,35	B
122	Teluk Wondama	63,27	B
123	Teluk Bintuni	65,01	B
124	Sorong	65,37	B
125	Raja Ampat	64,74	B
126	Kota Sorong	67,51	B
127	Prov. Papua	64,35	B
128	Merauke	61,17	B
129	Mappi	63,63	B
130	Kota Jayapura	64,68	B

Daftar Satker Yang Menjadi Sampel Reviu Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020

No	Unit Kerja	Kesesuaian SAP
1	BPS Provinsi Sumatera Barat	Sesuai
2	Wilayah Provinsi Sumatera Barat	Sesuai
3	BPS Kota Padang	Sesuai
4	BPS Kabupaten Padang Pariaman	Sesuai
5	BPS Kabupaten Agam	Sesuai
6	Polteknik STIS	Sesuai
7	BPS Kabupaten Karimun	Sesuai
8	BPS Provinsi Kepulauan Riau	Sesuai
9	Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	Sesuai
10	BPS Kabupaten Bintan	Sesuai
11	BPS Provinsi Papua Barat	Sesuai
12	Wilayah Provinsi Papua Barat	Sesuai
13	BPS Kabupaten Sorong	Sesuai
14	BPS Kabupaten Teluk Bintuni	Sesuai
15	BPS Provinsi Sumatera Selatan	Sesuai
16	Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Sesuai
17	BPS Kota Palembang	Sesuai
18	BPS Kabupaten Banyuasin	Sesuai
19	BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir	Sesuai
20	BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sesuai
21	Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sesuai
22	BPS Kabupaten Bangka	Sesuai
23	BPS Kota Pangkal Pinang	Sesuai
24	BPS Provinsi Sulawesi Tenggara	Sesuai
25	Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara	Sesuai
26	BPS Kabupaten Konawe	Sesuai
27	BPS Kabupaten Konawe Selatan	Sesuai
28	BPS Kota Kendari	Sesuai
29	BPS Provinsi Sulawesi Barat	Sesuai
30	Wilayah Provinsi Sulawesi Barat	Sesuai
31	BPS Kabupaten Mamuju	Sesuai
32	BPS Kabupaten Mamasa	Sesuai
33	BPS Kabupaten Ponorogo	Sesuai
34	BPS Kabupaten Kediri	Sesuai
35	BPS Kabupaten Malang	Sesuai
36	BPS Provinsi Jawa Timur	Sesuai
37	Wilayah Provinsi Jawa Timur	Sesuai
38	BPS Kota Surabaya	Sesuai
39	BPS Kabupaten Jember	Sesuai
40	BPS Kabupaten Sidoarjo	Sesuai

41	BPS Kabupaten Pasuruan	Sesuai
42	BPS Kabupaten Banyuwangi	Sesuai
43	BPS Provinsi Kalimantan Selatan	Sesuai
44	Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	Sesuai
45	BPS Kabupaten Banjar	Sesuai
46	BPS Kota Banjarmasin	Sesuai
47	BPS Kota Banjar Baru	Sesuai
48	BPS Provinsi Papua	Sesuai
49	Wilayah BPS Provinsi Papua	Sesuai
50	BPS Kabupaten Asmat	Sesuai
51	BPS Kabupaten Jayawijaya	Sesuai
52	BPS Kabupaten Mimika	Sesuai
53	BPS Provinsi DI Yogyakarta	Sesuai
54	Wilayah Provinsi DI Yogyakarta	Sesuai
55	BPS Kabupaten Sleman	Sesuai
56	BPS Kabupaten Gunung Kidul	Sesuai

Data Auditor Yang Memenuhi Standar Serifikasi Diklat Sesuai Jenjang

No.	Jenjang Auditor/Jabatan	Jumlah Pegawai	Jumlah Auditor Yang Memenuhi Standar
1	Auditor Madya	4	3
2	Auditor Muda	8	7
3	Auditor Pertama	4	1
4	Auditor Penyelia	1	1
5	Staf / Fungsional Umum	7	1
	Jumlah	24	13

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik
(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia,
Telp (62-21) 3841195, 3842508, 3810291, Faks (62-21) 3857046,
Mailbox : bpsdq@bps.go.id
Website : bps.go.id